

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan negara-negara di Asia lainnya mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, isu mengenai *corporate governance* telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di masa yang akan datang. Walaupun istilah *corporate governance* hampir tidak dikenal di Indonesia pada masa sebelum krisis, namun pada dasarnya istilah tersebut digunakan untuk mewajibkan perusahaan mengontrol perusahaan demi peningkatan kinerja perusahaan. Dalam era globalisasi, perusahaan bisnis perlu memanfaatkan segala kelebihannya untuk dapat memenangkan persaingan yang semakin kuat. Kelebihan yang dimiliki perusahaan dapat berupa kemampuan lebih dalam bidang – bidang fungsional seperti marketing, keuangan, sumberdaya manusia maupun teknologi informasi. Pemanfaatan kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan bisnis akan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, bila perusahaan tersebut dikelola dengan cara yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Zaki Baridwan, 2001 dalam Beni, (2003).

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan kepentingan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban

perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosur*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat Waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager,2003 dalam Darmawati, 2004).

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance* (Darmawati *et al* 2004). Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan satu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, (1976) dalam Hastuti dan Theresia (2005). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetris informasi (*information asymmetric*) (Haris, 2004 dalam Irmala Sari, (2010). Asimetris antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manipulasi laba (*earnings management*). Untuk meminimumkan terjadinya tindakan manajemen laba, maka perusahaan perlu menerapkan mekanisme *good corporate governance* dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. *Pertama*, dengan memeperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Hastuti dan Theresia, (2005). Diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan nantinya dapat meningkatkan nilai perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Menurut Ross *et al* dalam Siallaga dan Macfoedz, 2006) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya sendiri.

Kepemilikan saham manajemen adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (Suranta dan Midiastuty, 2004). Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan.

Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd *et al*, (1998) dalam Suranta dan Midiastuty, 2004) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Dengan

kepemilikan institusional, pemegang saham mempunyai kemampuan untuk memainkan peranan dalam pengawasan manajemen, karena mereka mendapat kekuasaan melalui *voting right*. Adanya monitoring yang cukup tinggi membuat manajer mempunyai derajat *disretion* yang rendah dalam mengambil keputusan-keputusan untuk menguntungkan dirinya. Hal ini akan mengurangi konflik keagenan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Belkhir, 2005).

Ketiga, Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Allen dan Gale, (2000) dalam S. Beiner *et al*, (2003) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan mekanisme *governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan direksi.

Keempat, Melalui peran monitoring oleh dewan komisaris Independen (*independent commisioner*). Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manejer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*, Fama dan Jansen, (1983) dalam Irmala Sari, (2010). Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih

dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Jones, 1996 dalam Lastanti, 2004). Nama besar, kemauan dan itikad baik saja belum cukup untuk membangun dewan komisaris berkelas dunia, dibutuhkan struktur, sistem dan proses yang memadai. Dewan komisaris harus berperan aktif, independen dan konstruktif. (Alijoyo, A, 2004).

Kelima, Nilai *debt equity ratio* juga digunakan untuk menilai indikator mekanisme corporate governance internal pada perusahaan publik di Indonesia. Suad Husnan, (2001) dalam Wulandari (2006). *Debt to equity ratio* adalah kemampuan perusahaan untuk menutup sebagian atau seluruh hutang-hutangnya dengan dana yang berasal dari modal pemilik. (Grossman dan Hart, (1982) dalam Beni, (2003) menganjurkan bahwa *agency conflict* dapat dikurangi dengan penggunaan hutang karena penggunaan hutang akan mengikat perusahaan melalui pembayaran bunga dan cicilan secara periodik. Penggunaan hutang yang diproxikan dengan *debt to equity ratio* dapat meningkatkan *ROE* apabila memberikan tingkat keuntungan yang lebih besar dari bunga pinjaman (Beni, (2003). Dengan adanya *debt to equity ratio* maka manajemen perusahaan dituntut untuk berusaha mengoptimalkan pemakaian modal tersebut. Hasil penelitian Wulandari, (2006) menyatakan bahwa *debt to equity* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Corporat Social Responsibility (CSR) adalah sebuah wacana yang menjadikan perusahaan tidak hanya berkewajiban atau beroperasi untuk pemegang saham (*shareholders*) saja namun juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders*. CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban

perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dimana perusahaan tersebut berada. Pemikiran tersebut didasarkan pada 3P yaitu (profil, people, planet) menurut *Global Compact Initiative* yaitu tujuan perusahaan tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profil*) namun juga untuk kesejahteraan orang (*people*), dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup planet ini. Nugroho, (2005). Sedangkan menurut *The World Business Council for Sustainable development (WBCSD), Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan (Nurlela dan Islanuddin, 2008).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004 dalam Sam'ani, (2008).). *Cash flow return on assets (CFROA)* merupakan salah satu pengukuran

kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett *et al.*, 2006 dalam Sam'ani, (2008).

Berdasarkan latar belakang diatas adanya penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ **Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governace* dan *Coorporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Perusahaan**”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2006) yang berusaha menganalisis apakah mekanisme good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang pertama adalah pada periode waktu yang digunakan yaitu dari periode 2006 – 2009 dan yang kedua adalah dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan *cash flow return on asset* (CFROA) dan menambahkan pengungkapan *Coorporate Social Responsibility* serta kepemilikan manajerial sebagai variabel independen.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, batasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Dalam penelitian ini Mekanisme *Good Corporate Governace* diproxikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, *debt to equity ratio*.
2. Dalam penelitian ini *Coorporat Social Responsibility* diproxikan dengan *Coorporat Social Responsibility Disclosure Indeks (CSRI)*.

3. Dalam penelitian ini Kinerja Perusahaan diukur dengan *cash flow return on asset* (CFROA).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, serta khususnya yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility*.
2. Hasil penelitian mengenai *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dapat dipergunakan bagi manajemen perusahaan sebagai bahan dan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan maupun langkah strategik.

3. Bagi para investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja suatu perusahaan.